



1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Warga Marunda Direkolasi

Blok C Rusunawa Marunda di Jakarta Utara tak layak huni berdasar riset Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebanyak 451 keluarga di tempat itu direlokasi ke Rusun Nagrak.

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 451 keluarga akan dipindahkan dari Blok C Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda ke Rusunawa Nagrak di Jakarta Utara. Pemandangan secara bertahap ini dilakukan karena rusun tak layak huni dan ada insiden plang nama roboh.

Saharudin, Ketua RT 005 RW 012 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, menjelaskan, bangunan rusun yang ambruk pada 30 Agustus malam merupakan plang nama Blok C5. Plang nama yang telah rapuh itu roboh dan menimpa empat unit rusun Blok C5.

"Sebenarnya plang nama yang ambruk. Tetapi, karena dekat atap, kanopi juga ikut ambruk dan jatuh hingga ke lantai dasar," kata Saharudin saat dihubungi, Senin (4/9/2023), di Jakarta.

Sejak robohnya plang nama rusun pada 30 Agustus lalu, atap dan kanopi sejumlah rusun di Blok C5 masih terus berjatuhan. Pada Minggu (3/9), salah satu warga yang tinggal di rusun itu nyaris tertimpa puing bangunan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyningrum mengatakan, bangunan Blok C (C1-C5) sudah tak layak huni berdasarkan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pihaknya sudah menyoialisasikan pemindahan warga Blok C Rusunawa Marunda ke Rusunawa Nagrak.

"Mereka akan dipindahkan ke Nagrak bulan ini (Septem-

ber). Blok C akan direvitalisasi mulai 2024," ujar Retno.

Prioritas pertama yang dipindahkan ke Nagrak adalah 93 keluarga dari Blok C5. Berdasarkan catatan *Kompas*, Rusunawa Marunda dibangun pada 2004 dan selesai pada 2005. Rusun ini mulai dihuni 2006.

Sulit akses

Dalam rapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, disebutkan, banyak warga kesulitan mengakses rusunawa. Padahal, terdapat 5.000 unit rusunawa yang belum terisi.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah prihatin atas hal itu. Sebab, terdapat 445 RW kumuh dari total 2.744 RW se-Jakarta dan banyak warga belum punya hunian layak. "Warga di Kapuk Muara tinggal di atas sampah dan tidak layak. Juga di kolong tol banyak penghuni ber-KTP DKI," tutur Ida.

Retno mengatakan, ada 5.040 unit rusunawa kosong. Pihaknya mengakomodasi 4.001 permohonan hingga tahap siap huni dan 848 permohonan dalam tahap administrasi. "Dari (5.040) unit kosong itu ada juga yang tidak layak huni," ucapnya.

Badan Pusat Statistik menyebut, akses warga DKI terhadap hunian layak selama tiga tahun terakhir tergolong rendah. Pada 2020, jumlah rumah tangga di Jakarta yang

memiliki akses terhadap hunian layak 33,18 persen dan meningkat menjadi 40 persen pada 2021. Namun, pada 2022, akses rumah tangga di Ibu Kota terhadap hunian layak menjadi 36,23 persen.

Jika merujuk data Badan Pusat Statistik DKI, sekitar 1,77 juta rumah tangga belum memiliki akses ke hunian layak dari total 2,78 juta rumah tangga di Jakarta pada 2022.

Ketua Kelompok Perumahan dan Permukiman Perkotaan Universitas Indonesia Joko Adianto mengatakan, bangunan publik yang dimiliki pemerintah seharusnya sudah memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan gedung. Oleh karena itu, jika ada bangunan yang sudah tak layak huni, pemerintah seharusnya segera merevitalisasi.

"Masyarakatnya direlokasi untuk sementara selama bangunan itu diperbaiki dan dijamin kualitasnya memenuhi standar keselamatan dan keamanan gedung," kata Joko.

Menurut Joko, secara umum, usia suatu bangunan dinyatakan layak huni hingga 30-50 tahun. Namun, untuk gedung yang dibangun pada 1990-an hingga 2000-an, rata-rata memenuhi standar layak huni hingga 30 tahun.

"Jadi, kalau usia bangunan mendekati 30 tahun, sudah harus kembali dikaji umur dan keandalan bangunan. Harus ada pemeriksaan berkala dan perawatan," ucapnya.

(DAN/VAN)